

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan dapat dimaknai sebagai berkelanjutan berlangsung secara terus menerus di berbagai sektor strategis, seperti bidang ekonomi, pengelolaan SDA, kualitas SDM, pendidikan, hingga sektor industri. Seluruh proses tersebut diarahkan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat secara menyeluruh. Kesejahteraan menjadi sasaran utama dari pembangunan. Namun, dalam praktiknya, pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat masih menjadi tantangan yang dihadapi di sejumlah negara, termasuk wilayah Indonesia. Salah satu faktor kunci yang melatarbelakangi kondisi tersebut yaitu tingginya angka kemiskinan membatasi kemampuan individu dalam mencukupi kebutuhan hidup (Sholikhah et al., 2021).

Kesejahteraan masyarakat dapat diukur melalui sejumlah indikator, salah satunya adalah kondisi kesejahteraan yang mereka alami secara langsung. seperti kesehatan masyarakat yang baik, perekonomian yang terus meningkat, tingkat pendidikan yang tinggi, serta kualitas hidup yang layak bagi seluruh anggota masyarakat (Sultan et al., 2023). Akibatnya, kemiskinan dikaitkan dengan kesejahteraan masyarakat. Kemiskinan dipandang sebagai permasalahan yang bersifat kompleks dan multidimensional, sehingga upaya penanggulangannya memerlukan pendekatan yang menyeluruh serta mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat.

Kemiskinan merupakan permasalahan sosial yang bersifat luas dan kompleks, dan terus menjadi fokus kebijakan utama yang mendapat perhatian serius dari berbagai pemerintah di berbagai negara. Keberadaan kemiskinan dapat menjadi hambatan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat salah satu aspek yang turut menyebabkan situasi ini adalah lemahnya daya beli masyarakat akibat keterbatasan pendapatan yang diperoleh. Beragam faktor turut memengaruhi tingkat kemiskinan, di antaranya adalah pertumbuhan ekonomi yang belum mencapai tingkat optimal serta rendahnya, rendahnya tingkat pendidikan, serta meningkatnya angka pengangguran. Tingkat kemiskinan di Indonesia dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya adalah upah minimum yang belum cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat (Radityana et al., 2023).

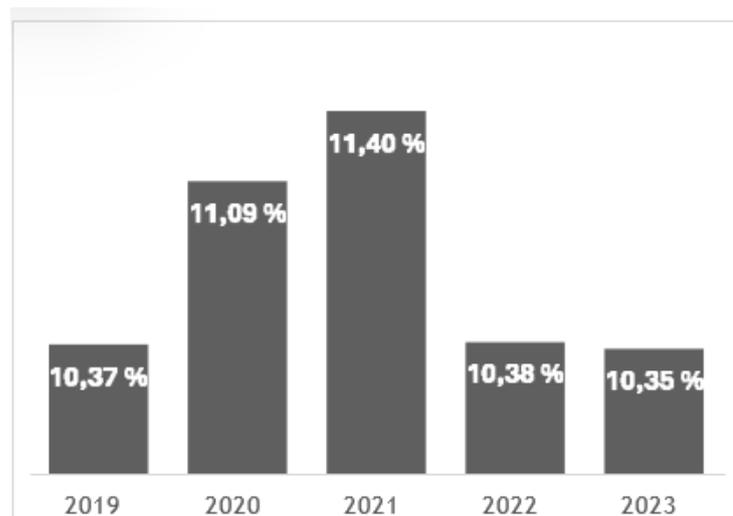
Berdasarkan definisi dari BPS, Kemiskinan dapat diartikan sebagai kondisi saat seseorang tidak memiliki akses yang memadai terhadap sumber daya guna memenuhi keperluan dasar pokok minimum, baik bersifat konsumtif seperti pangan maupun non-konsumtif seperti sandang, papan, dan layanan dasar lainnya. Selain itu, BPS juga menetapkan bahwa seseorang dikategorikan miskin apabila asupan kalorinya berada di bawah 2.100 kilokalori per hari.

Kemiskinan dapat disebabkan oleh berbagai faktor, di antaranya rendahnya kualitas sumber daya manusia, pengelolaan sumber daya alam yang kurang optimal, serta rendahnya tingkat pendidikan. Selain itu, kurangnya pengetahuan dalam mengembangkan sektor perekonomian, baik di bidang pertanian maupun industri, tingginya angka pengangguran, serta perlambatan pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun turut berkontribusi terhadap permasalahan kemiskinan. Faktor-faktor

tersebut saling berkaitan dan dapat memperburuk kondisi sosial serta kesejahteraan masyarakat jika tidak diatasi dengan kebijakan yang tepat (Indriani, 2019).

Provinsi Jawa Timur termasuk dalam kategori wilayah dengan luas geografis yang signifikan serta populasi penduduk yang tinggi dibandingkan provinsi lainnya di wilayah Indonesia yang secara letak geografis berada di bagian timur Pulau Jawa. Provinsi ini terdiri dari 38 kabupaten/kota, dengan Kota Surabaya sebagai ibu kotanya. Pada tahun 2023, tingkat kemiskinan di Jawa Timur tercatat mencapai 10,35%.

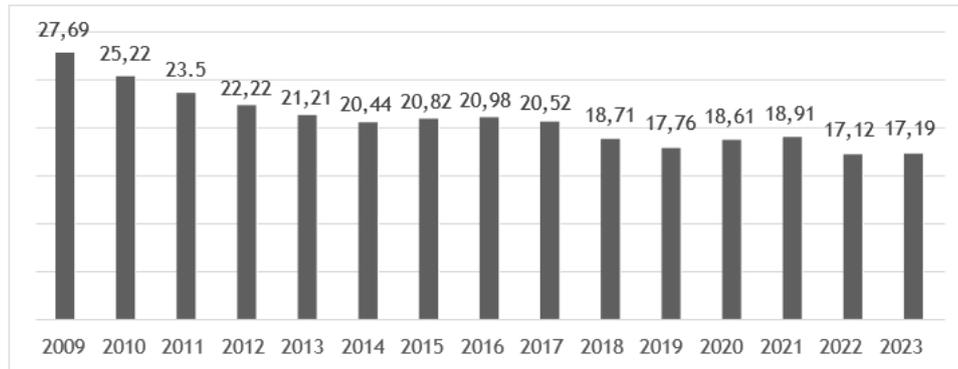
Gambar 1.1
Tingkat Kemiskinan di Jawa Timur, 2019-2023



Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Probolinggo, 2025 (data diolah).

Gambar 1.1, diketahui pada tahun 2019 tingkat kemiskinan tercatat sebesar 10,37%. Angka ini mengalami kenaikan sebesar 0,72 yakni dengan persentase menjadi 11,09% di tahun 2020. Kenaikan terjadi di tahun 2021, dengan peningkatan sebesar 0,31 yakni dengan persentase 11,40% dan pada tahun 2023, tingkat kemiskinan kembali turun sebesar 0,03%, atau 10,35%.

Gambar 1.2
Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Probolinggo, 2009-2023 (Persen)



Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Probolinggo, 2025 (data diolah).

Pada gambar 1.2, tingkat kemiskinan terjadi penurunan mulai dari 27,69% di tahun 2009 naik ke angka 25,22% pada tahun 2010. Penurunan kembali pada tahun 2011, meskipun tidak terlalu besar, yaitu menjadi 23,5%. Setelah itu, tingkat kemiskinan kembali naik pada tahun 2020 mencapai 20,98% Namun, sejak tahun 2012 hingga 2022 cenderung mengalami penurunan dengan angka terendah di tahun 2022 sebesar 17,12%.

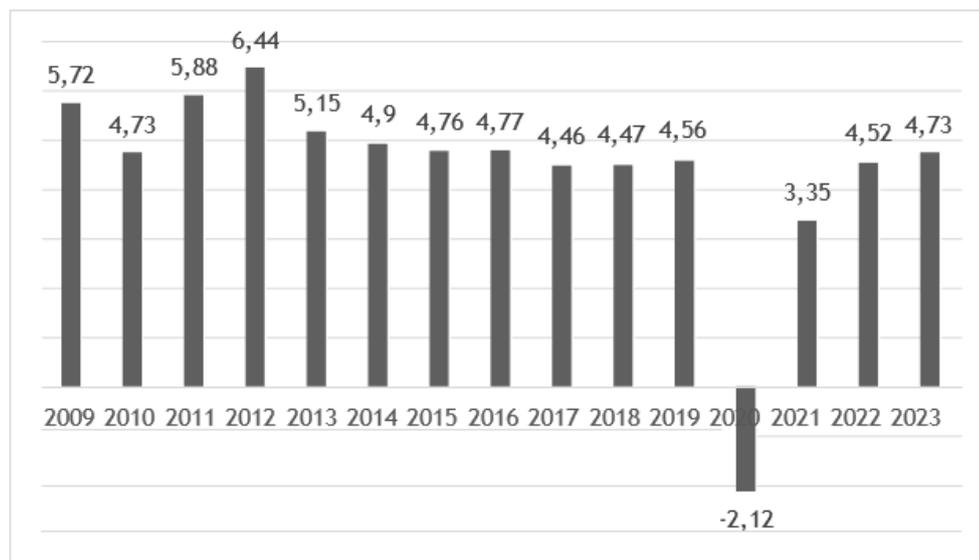
Terlepas dari kemiskinan, pertumbuhan ekonomi merupakan indikator perkembangan ekonomi yang memungkinkan peningkatan tingkat kemakmuran. Menurut Schumpeter dalam (Putong, 2008), pertumbuhan ekonomi dipahami sebagai proses peningkatan pendapatan nasional atau output yang berlangsung secara berkelanjutan, seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk secara alamiah serta meningkatnya tingkat tabungan masyarakat. Selain itu, sejumlah ahli dalam bidang ekonomi pembangunan juga menyebutkan bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator utama yang mencerminkan sejauh mana negara mampu mencapai kemajuan. Apabila aktivitas perekonomian pada periode

tertentu lebih tinggi dibandingkan periode sebelumnya, maka kondisi tersebut dapat diartikan sebagai pertumbuhan ekonomi.

Pertumbuhan ekonomi berfungsi sebagai indikator kunci dalam menilai sejauh mana pembangunan berhasil dilaksanakan, terutama terkait dengan efektivitas pemanfaatan sumber daya yang ada dalam menciptakan kesempatan kerja dan meningkatkan penyerapan tenaga kerja. Indikator ini merepresentasikan adanya pertumbuhan kemampuan suatu wilayah dalam memproduksi barang dan jasa. Dengan meningkatnya produksi, kebutuhan terhadap tenaga kerja juga bertambah, sehingga dapat mengurangi tingkat pengangguran serta menurunkan angka kemiskinan (Lendentariang et al., 2019).

Gambar 1.3

Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Probolinggo, 2009-2023 (Persen)

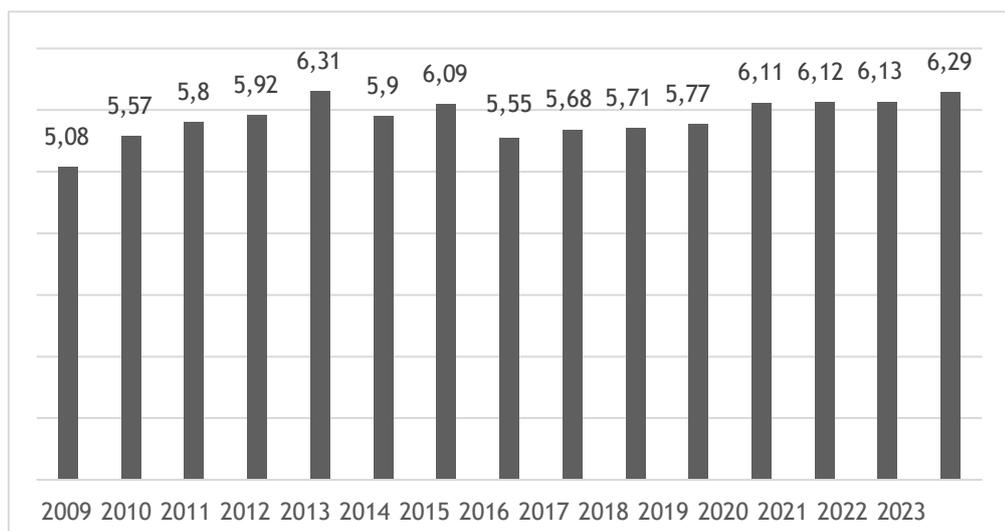


Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Probolinggo, 2025 (data diolah).

Gambar 1.3 menunjukkan pertumbuhan ekonomi 2009-2023 tidak menunjukkan tren yang konsisten, di mana pada beberapa tahun mengalami peningkatan, sementara pada tahun-tahun lainnya mengalami penurunan. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Probolinggo pernah mengalami penurunan hingga -2,12% pada tahun 2020 yang disebabkan oleh penurunan kinerja di sektor transportasi dan pergudangan. Di samping itu, tingginya jumlah penduduk juga menjadi tantangan utama dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi suatu daerah, terutama apabila tidak di iringi dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia dan tersedianya kesempatan kerja yang memadai (Suhandi et al., 2018).

Gambar 1. 4

Tingkat Pendidikan di Kabupaten Probolinggo, 2009-2023 (Pesen)



Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Probolinggo, 2025 (data diolah).

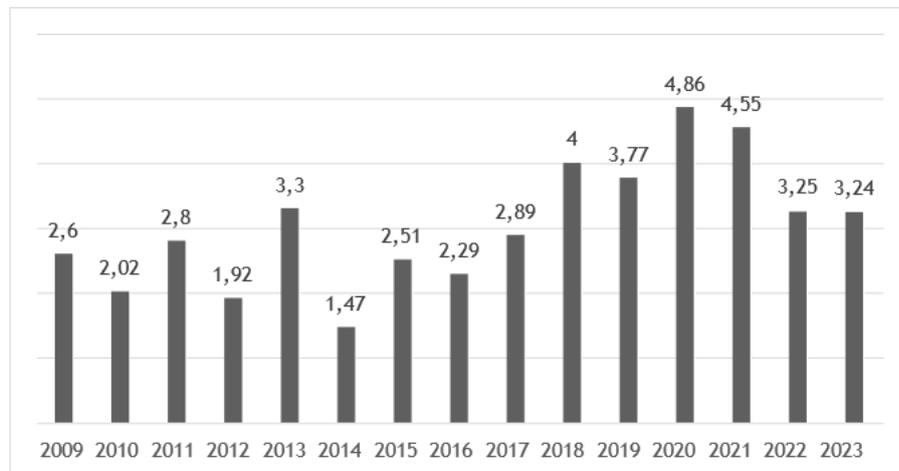
Gambar 1.4 menyatakan bahwa tingkat pendidikan di Kabupaten Probolinggo tidak selalu meningkat, Pada tahun 2009, tingkat pendidikan di Kabupaten Probolinggo berada di angka 5,08%. Kemudian terjadi peningkatan yang relatif konsisten hingga mencapai puncaknya pada tahun 2013 dengan nilai

6,15%. Setelah itu, terjadi penurunan pada tahun 2014 ke angka 5,9%, namun kemudian kembali naik dan turun pada tahun-tahun berikutnya.

Selain pertumbuhan ekonomi tersebut, pendidikan juga memegang peran penting dalam perkembangan ekonomi. Menurut Edgar Dalle dalam Indriani (2019), Pendidikan adalah suatu proses yang berlangsung secara terencana dan diselenggarakan secara sadar oleh keluarga, masyarakat, serta pemerintah melalui berbagai aktivitas, seperti pembinaan, pengajaran, dan pelatihan, yang dapat dilakukan di lingkungan pendidikan formal maupun nonformal. Tujuan pendidikan adalah untuk menyiapkan siswa untuk beradaptasi dan berperan secara berkelanjutan dalam berbagai aspek kehidupan mereka di masa depan.

Pendidikan adalah kunci untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja dan pengetahuan individu. Semakin tinggi pendidikan, semakin baik kemampuan seseorang, yang mendukung pertumbuhan ekonomi. SDM berkualitas tinggi diperlukan untuk menciptakan nilai tambah dan menyerap angkatan kerja, sehingga dapat mengurangi kemiskinan. Namun, masalah kemiskinan sering kali disebabkan oleh rendahnya pertumbuhan populasi yang tidak terkontrol dan tingkat pendidikan masyarakat. Situasi ini dapat menyempitkan kesempatan kerja, sehingga jumlah pengangguran semakin meningkat akibat banyaknya masyarakat yang belum memiliki pekerjaan.

Gambar 1.4
Pengangguran di Kabupaten Probolinggo, 2003-2022 (Persen)



Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Probolinggo, 2025 (data diolah).

Gambar 1.5 menunjukkan bahwa jumlah pengangguran di Kabupaten Probolinggo selama kurun waktu 2009 hingga 2022 menunjukkan pola yang fluktuatif, ditandai dengan naik turunnya angka setiap tahunnya mengalami perubahan. Di tahun 2009, jumlah pengangguran mencapai 2,6% dan mengalami penurunan secara bertahap hingga mencapai titik terendah pada 2014, yaitu sebesar 1,47%. Akan tetapi, pada tahun 2017 terjadi peningkatan menjadi 2,89%, dan tren kenaikan ini berlanjut hingga mencapai puncaknya pada tahun 2020 dengan tingkat pengangguran sebesar 4,86%. Kenaikan tajam ini diperkirakan sebagai akibat dari krisis ekonomi dan terganggunya sektor ketenagakerjaan akibat pandemi COVID-19. Dengan kondisi tersebut, Kabupaten Probolinggo berada pada peringkat keempat sebagai suatu region yang menunjukkan persentase kelompok masyarakat berpenghasilan rendah tertinggi di wilayah Provinsi Jawa Timur.

Faktor lain yang juga berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan adalah pengangguran. Salah satu unsur yang menentukan kemakmuran suatu masyarakat adalah tingkat pendapatan. Pendapatan masyarakat mencapai maksimum apabila kondisi tingkat penggunaan tenaga kerja penuh (full employment) dapat terwujud.

Menurut Sadono Sukirno dikutip dari Ahmad (2020), Pengangguran yang tinggi dapat mengakibatkan penurunan pendapatan masyarakat, yang pada berimplikasi terhadap penurunan taraf kesejahteraan penduduk secara keseluruhan. Penurunan kesejahteraan tersebut dapat memicu munculnya permasalahan sosial lainnya, salah satunya adalah meningkatnya angka kemiskinan.

Pengangguran merupakan isu ekonomi makro yang berdampak langsung dan signifikan terhadap individu. Bagi banyak orang, kehilangan pekerjaan dapat menyebabkan kualitas hidup yang lebih buruk dan beban psikologis. Indikator tingkat pengangguran terbuka (TPT) digunakan oleh Badan Pusat Statistik untuk menghitung tingkat pengangguran. Pengangguran berdampak negatif pada kesehatan seseorang. Tingkat kemiskinan di suatu wilayah berkorelasi positif dengan tingkat pengangguran. Penurunan minat yang disebabkan oleh pengangguran akan meningkatkan risiko terjerumus ke dalam kemiskinan (Choirur et al., 2021).

Berdasarkan latar belakang tersebut diketahui pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Probolinggo tidak selalu mengalami kenaikan dalam 15 tahun terakhir, tingkat pendidikan mulai mengalami kenaikan berdasarkan rata-rata lama sekolahnya dalam 8 tahun terakhir, Namun, untuk tingkat pengangguran terjadi penurunan selama 3 tahun terakhir dalam 15 tahun. Dengan mempertimbangkan

kondisi tersebut, peneliti memilih Kabupaten Probolinggo dan sebagai lokasi penelitian. Hal ini didasarkan pada data yang menunjukkan bahwa Kabupaten Probolinggo memasukan daftar kabupaten penduduk miskin Jawa Timur. Kabupaten Probolinggo memiliki peringkat kemiskinan ke-4 tertinggi di Jawa Timur. Hal ini menjadi alasan bagi peneliti untuk mengkaji lebih lanjut permasalahan terkait kemiskinan di daerah tersebut. Penulis mengangkat tema ini dalam skripsi yang berjudul: **“Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Pendidikan Dan Tingkat Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Kabupaten Probolinggo”**

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah ada pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Probolinggo?
2. Apakah ada pengaruh tingkat pendidikan terhadap tingkat Kemiskinan di Kabupaten Probolinggo?
3. Apakah ada pengaruh tingkat pengangguran terhadap tingkat Kemiskinan di Kabupaten Probolinggo?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap tingkat Kemiskinan di Kabupaten Probolinggo.
2. Untuk mengetahui pengaruh Tingkat Pendidikan terhadap tingkat Kemiskinan di Kabupaten Probolinggo.
3. Untuk mengetahui pengaruh Tingkat Pengangguran terhadap tingkat Kemiskinan di Kabupaten Probolinggo.

1.4 Ruang Lingkup Penelitian

Lokasi penelitian berada di Kabupaten Probolinggo, dengan fokus utama pada tingkat kemiskinan sebagai variabel dependen. Adapun variabel independennya terdiri dari pertumbuhan ekonomi, tingkat pendidikan, dan tingkat pengangguran. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan menerapkan metode analisis regresi linier berganda. Jenis data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari publikasi BPS Kabupaten Probolinggo serta BPS pusat, yang mencakup kurun waktu antara tahun 2009 hingga 2023.

1.5 Manfaat Penelitian

a. Bagi pemerintah daerah

Kajian ini diharapkan dapat digunakan sebagai dasar untuk menjadi pertimbangan strategis sebagai acuan bagi pemerintah daerah untuk dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang lebih terarah, khususnya dalam rangka menekan angka kemiskinan di Kabupaten Probolinggo.

b. Bagi para pembaca

Temuan dari studi ini berpotensi dijadikan acuan ilmiah bagi pembaca atau peneliti lain yang ingin memperluas kajian mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kemiskinan, terutama dalam konteks wilayah tertentu.